

**ANALISIS PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP ISU PELECEHAN DAN
KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NABILA SALSA AFFRILIANA

18323202

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**ANALISIS PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP ISU PELECEHAN DAN
KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NABILA SALSA AFFRILIANA

18323202

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP ISU PELECEHAN DAN
KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG TAHUN 2017-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
3. Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022

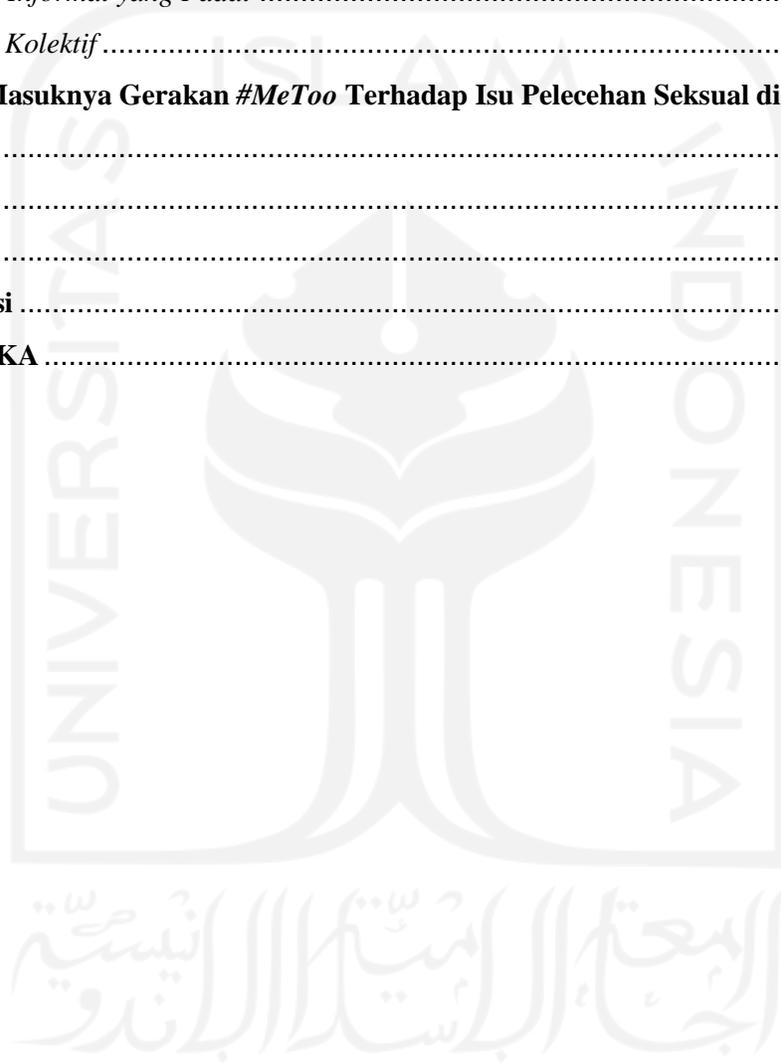


Nabila Salsa Affrithana 18323202

DAFTAR ISI

ANALISIS PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP ISU PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG TAHUN 2017-2019	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ANALISIS PENGARUH GERAKAN #METOO TERHADAP ISU PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG TAHUN 2017-2019	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	15
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	16
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2	18
GERAKAN #METOO DAN AWAL MASUKNYA DI JEPANG	18
2.1 The Origin of #MeToo Movement	18
2.1.1 <i>Global Movement</i>	18
2.1.2 <i>Masuknya Gerakan #MeToo di Jepang</i>	20
2.2 Faktor-Faktor yang Mendukung Pelecehan Seksual Di Jepang	23
2.2.1 <i>Faktor Budaya</i>	24
2.2.2 <i>Faktor Politik-Ekonomi</i>	26

2.2.3 Faktor Lingkungan-Sosial	28
BAB 3.....	31
UPAYA GERAKAN #METOO JEPANG DALAM MENGATASI ISU PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG	31
3.1 #MeToo dalam Memengaruhi Isu Pelecehan Seksual di Jepang	31
3.1.1 Aksi Kolektif Konfliktual.....	34
3.1.2 Jaringan Informal yang Padat	36
3.1.3 Identitas Kolektif.....	40
3.2 Hasil Dari Masuknya Gerakan #MeToo Terhadap Isu Pelecehan Seksual di Jepang.....	45
BAB IV	47
PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	50



ABSTRAK

Selain dikenal sebagai negara yang maju dalam industri teknologinya, Jepang juga dikenal sebagai negara yang masih memegang teguh tradisi dan budaya. Salah satu yang masih kental di Jepang adalah budaya patriarki. Hal ini membuat tingkat kesetaraan gender di Jepang lebih rendah dibandingkan banyak negara lainnya. Ketidaksetaraan gender ini juga menjadi faktor yang mendorong tingkat pelecehan seksual di Jepang. Dengan masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang pada tahun 2017, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah Jepang atas isu pelecehan seksual yang ada di Jepang. Pengaruh gerakan *#MeToo* dalam mengatasi isu pelecehan seksual di Jepang ini yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *social movement* oleh Della Porta dan Diani. Dalam penelitian ini juga akan dijelaskan juga tiga mekanisme aksi kolektif yang dijelaskan oleh Diani. Dengan diangkatnya isu pelecehan seksual di Jepang diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap isu tersebut.

Kata kunci: Jepang, Gerakan *#MeToo*, Pelecehan Seksual, Kekerasan Seksual, *Social Movement*.

ABSTRACT

Besides being known as an advanced country in its technology industry, Japan is also known as a country that still adheres to traditions and culture. One thing that is still strong in Japan is patriarchal culture. This makes the level of gender equality in Japan lower than many other countries. This gender inequality is also a factor driving the level of sexual harassment in Japan. With the entry of the *#MeToo* movement in Japan in 2017, it is hoped that it will increase public and Japanese government awareness on the issue of sexual harassment in Japan. The influence of the *#MeToo* movement in overcoming the issue of sexual harassment in Japan, which will be discussed later in this study, uses a social movement approach by Della Porta and Diani. In this study, the three mechanisms of collective action described by Diani will also be explained. By raising the issue of sexual harassment in Japan, it is hoped that the government will pay more attention to this issue.

Keywords: Japan, *#MeToo* Movement, Sexual Harassment, Sexual Violence, Social Movement.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Bahasa Jepang terdapat peribahasa yang mengatakan “Perempuan menjadi dasar kekuatan suatu negara”. Hal ini dikarenakan masyarakat Jepang meyakini bahwa perempuan yang nantinya akan mendidik anak-anak mereka agar menjadi SDM terbaik bagi negara. Dari peribahasa tersebut dapat dilihat betapa pentingnya peran perempuan dalam kemajuan sebuah negara. Keberhasilan sebuah negara tidak lain berkat peran perempuan, terutama yang menjadi seorang ibu (Sunarni & Firmansyah, 2020). Namun hal ini bukan berarti Jepang menjadi negara yang ramah terhadap perempuan. Justru dengan pandangan masyarakat yang melihat bahwa perempuan memiliki peran besar sebagai ibu, membuat perempuan tidak memiliki banyak pilihan dalam mengejar karirnya setelah menikah. Hal ini karena masyarakat masih sering salah mengartikan gender. Gender merupakan istilah yang digunakan untuk merangkum karakter psikologis dan kultural yang dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan (Alami, 2010). Kebanyakan masyarakat masih mengira gender sama dengan kelamin atau seks. Oleh karena itu, masyarakat masih menganggap urusan rumah tangga dan mendidik anak masih sering dianggap sebagai tugas ibu, dan ayah hanya bertugas mencari nafkah. Namun hal ini tidak membenarkan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbeda dalam dunia kerja.

Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki kesetaraan gender yang rendah (Sari, 2020). Berdasarkan data dari Global Gender Gap Report tahun 2018 (World Economic Forum 2018), Jepang berada pada posisi 110 dari 149 negara sebagai negara dengan kesenjangan gender. Di Jepang kebanyakan perempuan tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Hal ini bukan tanpa alasan, dalam dunia kerja di Jepang perempuan tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencapai posisi yang penting, sehingga kebanyakan perempuan Jepang memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah daripada mengejar karirnya. Selain itu masih terdapat kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan (Sari, 2020, 360). Pada tahun 2018, kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan terpaut 24,5%, dan berada di posisi terbesar kedua di antara negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (YAMAGUCHI 2019). Selain ketidaksetaraan gender, di Jepang masih banyak terjadi kasus pelecehan dan kekerasan seksual.

Sejak dulu Jepang memiliki tradisi yang dapat dikatakan melecehkan perempuan, seperti *jugun ianfu* dan geisha. *Jugun ianfu* atau *comfort women* merupakan sekelompok wanita yang diculik maupun dibujuk halus dengan dijanjikan sekolah gratis maupun pekerjaan oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia II antara 1942-1945. Mereka dipaksa menjadi pemuas nafsu para tentara Jepang pada masa itu. Anggota *jugun ianfu* pada masa itu cukup banyak, bahkan mencapai angka kisaran 200 ribu-400 ribu orang perempuan Asia usia 13-25 tahun dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang (Rusman, 2010). Wanita-wanita tidak hanya diambil dari tanah jajahan Jepang, bahkan 40% anggota *jugun ianfu* adalah wanita Jepang. Sedangkan Geisha dalam bahasa Jepang memiliki arti penghibur, seniman, entertainer. Pada abad ke-18

dan 19 geisha sangat umum ditemukan, bahkan hingga saat ini geisha masih sering dijumpai. Geisha saat ini umum ditemukan di restoran-restoran, mereka bertugas untuk melayani dan menghibur pelanggan dengan menyanyi dan menari. Tugasnya sebagai penghibur terkadang disalah artikan oleh masyarakat Jepang sebagai pelacur, meskipun tidak sepenuhnya benar karena untuk menjadi seorang geisha harus menempuh pendidikan tertentu dan geisha hanya memberikan layanan seksual kepada *danna*-nya (Suliyati, 2018).

Meskipun tidak seperti zaman dahulu yang menjadikan perempuan budak seks secara paksa, tetapi pelecehan seksual di Jepang masih banyak terjadi, seperti pelecehan seksual di lingkungan kerja, pelecehan seksual di transportasi umum, pelecehan seksual di sekolah, bahkan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menurut data dari Departemen Kepolisian Tokyo, terjadi 1750 kasus pelecehan seksual di tahun 2017, 50% kasus pelecehan terjadi di kereta api, dan 20% di stasiun kereta api (Plate 2019). Menurut *The Ministry of Health, Labour, and Welfare* jumlah orang yang melakukan konsultasi mengenai pelecehan seksual terus meningkat. Dalam dunia kerja, perempuan juga sering mendapatkan pelecehan seksual oleh sesama rekan kerjanya. Pelecehan yang dialami pun beragam, mulai dari karyawan pria yang menunjukkan gambar telanjang di komputer rekan kerja wanitanya, atasan yang mengundang karyawan wanitanya untuk berkencan, dan berbagai macam jenis pelecehan lainnya (Marikkar, 2009, 124). Bahkan pada tahun ajaran baru 2018, 282 guru di sekolah umum Jepang dijatuhi hukuman karena menjadi pelaku pelecehan seksual, angka ini naik dari tahun sebelumnya (Selengke, 2019). Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Jepang ini masih marak terjadi karena masyarakat

Jepang yang masih menganggap bahwa pria menempati kedudukan yang lebih tinggi. Selain itu lelaki yang memiliki jabatan lebih tinggi di lingkungan kerja akan merasa lebih berkuasa dan bisa melakukan apapun terhadap bawahannya.

Tidak hanya di Jepang, pelecehan seksual seperti itu juga banyak dialami di negara lain. Oleh karena itu muncullah gerakan *#MeToo* di sosial media. Gerakan ini mulanya diganyangkan oleh perempuan-perempuan di Amerika Serikat untuk meningkatkan kesadaran atas pelecehan seksual (Murphy, 2019). Gerakan ini akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk Jepang. Gerakan ini membawa dampak baik bagi korban kasus pelecehan seksual. Beberapa korban mulai berani menyuarkan kasusnya dan menuntut keadilan. Misalnya saja pejabat di Kementerian Keuangan Jepang yang mengundurkan diri setelah adanya laporan yang menyatakan dirinya menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap jurnalis wanita, dan menangnya kasus wartawan Jepang Shiori Ito yang menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan reporter di salah satu lembaga penyiaran di Tokyo (Murphy, 2019).

Dari pemaparan di atas, saya ingin meneliti dampak dari gerakan *#MeToo* di Jepang. Meskipun topik penelitian mengenai gerakan *#MeToo* ini sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti seperti Kimura (2015), Marrikar (2009), Evans (2018), dan McCurry (2019), namun belum ada yang membahas topik tersebut di Jepang. Penelitian ini memilih Jepang sebagai subjek penelitian karena isu pelecehan seksual yang terjadi di Jepang cenderung kurang mendapatkan perhatian publik maupun pemerintah. Sedangkan tahun 2017-2019 diambil dengan alasan masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang pada tahun 2017 dan tahun 2019 diambil agar data yang dibutuhkan dapat tercukupi dan rentang waktu tidak terlalu jauh. Oleh karena itu penelitian ini akan

dilakukan untuk mengetahui apakah dengan adanya gerakan ini menjadi wanita-wanita yang mengalami pelecehan seksual berani buka suara dan melapor. Dan apakah ada pengurangan jumlah pelecehan seksual setelah gerakan *#MeToo* masuk ke Jepang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, skripsi ini akan membahas mengenai: “Bagaimana pengaruh gerakan *#MeToo* terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang pada tahun 2017-2019?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan rumusan masalah, skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui alasan masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang serta bagaimana gerakan tersebut dapat muncul.
2. Untuk mengetahui pengaruh gerakan *#MeToo* di Jepang dalam mengatasi isu kekerasan dan pelecehan seksual di Jepang.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus terhadap alasan masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang. Selain itu penelitian ini akan membahas mengenai dampak gerakan *#MeToo* dalam mengatasi isu pelecehan seksual di Jepang. Hal ini karena masih rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat Jepang mengenai pelecehan seksual. Penelitian ini memilih gerakan *#MeToo* karena gerakan ini dinilai paling cocok dengan fokus penelitian dalam skripsi ini. Pada rentang tahun 2017-2019 dimana gerakan *#MeToo* mulai masuk Jepang hingga kemudian menarik masyarakat Jepang untuk mulai mengambil tindakan berani dengan menyuarkan pelecehan seksual yang mereka alami melalui *#MeToo* di *Twitter*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam pembuatan penelitian ini, terdapat beberapa literatur yang juga membahas mengenai pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Jepang yang bisa digunakan sebagai pembanding dalam pembuatan penelitian ini. Namun untuk literatur yang meneliti mengenai gerakan *#MeToo* di Jepang, masih sedikit literatur yang memuatnya sehingga masih sedikit literatur yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan literatur yang meneliti mengenai pelecehan seksual di Jepang serta gerakan *#MeTo* diberbagai negara sebagai pembanding.

Dalam jurnal yang berjudul “*Discourses About Comfort Women in Japan, South Korea, and International Society*” (Kimura, 2015) menjelaskan bahwa Jepang bisa dikatakan tidak terlepas dari kata kekerasan seksual, hal ini karena Jepang telah dikenal dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada masa Perang Dunia II, yaitu *Comfort Women* atau *Jugun Ianfu*. Pada masa itu Jepang menggunakan wanita sebagai objek pemuas nafsu bagi tentara Jepang, mereka dipaksa untuk melayani tentara Jepang dan mendapatkan banyak perlakuan kekerasan. Korbannya pun bukan hanya

wanita Jepang, tetapi juga wanita-wanita dari negeri jajahan Jepang seperti Korea Selatan, dan Indonesia. Jurnal tersebut menjelaskan dengan baik bagaimana kekerasan seksual yang terjadi di Jepang pada Perang Dunia II. Namun karena fokusnya memang membahas isu *Comfort Women*, jurnal ini jadi tidak memberikan penjelasan yang lebih terkait isu pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Jepang pada saat ini. Sehingga dalam penelitian ini akan lebih menjelaskan mengenai isu kekerasan seksual yang terjadi di Jepang pada masa kini.

Jurnal berikutnya berjudul “*Sexual Harassment: A Social Issue in Japan*” (Marikkar, 2009), dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana Jepang yang kini menjadi negara maju nyatanya belum maju dalam soal kesetaraan gender. Budaya dan tradisi Jepang hingga saat ini masih kental dengan budaya patriarki, membeda-bedakan hak antara laki-laki dan perempuan. Padahal pada hakikatnya semua manusia itu terlahir sama dan sederajat baik laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual di Jepang masih menjadi masalah yang besar bagi Jepang, terutama dalam dunia kerja. Terhitung dua pertiga dari wanita Jepang pernah mengalami kasus pelecehan seksual. Banyak anggota pemerintahan Jepang yang melakukan pelecehan seksual terhadap bawahan perempuannya. Pada tahun 1999 Pemerintah Jepang telah mengeluarkan UU Ketenagakerjaan yang membuat perusahaan bertanggung jawab ketika terjadi pelecehan seksual di lingkungan kerjanya. Namun hal ini tidak menghalangi oknum-oknum pelecehan seksual, dengan terbukti setiap tahun keluhan dan kasus pelecehan seksual yang meningkat di Jepang. Bahkan lingkup pelecehan seksual yang terjadi semakin bertambah karena merambah ke lingkup sekolah. Pada tahun 2005 terungkap 166 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru sekolah di Jepang. Dari

166 kasus, 46,4% korban adalah pelajar, dan 2,4% adalah alumni. Hal ini membuktikan bahwa UU yang dibuat oleh Pemerintah Jepang belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi kekerasan seksual di Jepang. Jurnal ini memberikan informasi yang lengkap mengenai data-data yang penting untuk digunakan dalam penelitian ini. Namun jurnal ini tidak memberikan informasi lebih mengenai bagaimana tindakan Pemerintah Jepang kedepannya setelah kebijakan yang dibuat sebelumnya belum sepenuhnya berhasil dalam menangani pelecehan seksual di Jepang. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai apa saja tindakan yang diambil Pemerintah Jepang untuk mengatasi isu kekerasan seksual yang ada di Jepang terlebih setelah masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang.

Kemudian dalam jurnal berikutnya yang berjudul “*#MeToo: A Study on Sexual Assault as Reported in The New York Times*” (Evans, 2018), menjelaskan mengenai gerakan *#MeToo*. Gerakan *#MeToo* sendiri merupakan gerakan untuk melawan kekerasan dan pelecehan seksual. Gerakan ini dibuat sejak tahun 2006, namun baru ramai diperbincangkan pada tahun 2017 melalui media sosial Twitter ketika para artis papan atas mulai menggunakan tagar tersebut. Yaitu setelah artikel yang diterbitkan oleh New York Times mengenai pelecehan seksual Ashley Judd oleh produser film terkenal Harvey Weinstein. Setelah kasus ini muncul ke permukaan diketahui Judd bukan satu-satunya korban Weinstein. Dari situlah para korban Weinstein berani buka suara dan gerakan ini ramai diperbincangkan. Jurnal ini menarik karena mengangkat mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh pesohor sehingga lebih membuka mata pembaca mengenai dunia pesohor (*entertainment*). Namun jurnal ini masih memerlukan penelitian yang lebih mendetail seperti mengapa sebelum 2017 gerakan

#MeToo tidak ramai diperbincangkan, selain itu jurnal ini tidak menyampaikan bagaimana peran pemerintah dan kebijakan yang diambil setelah berita pelecehan seksual oleh pesohor ini terungkap. Sehingga dalam penelitian ini akan mencari tahu, mengapa gerakan #MeToo tidak ramai dibicarakan di Jepang mengingat isu kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender di Jepang yang cukup tinggi.

Dalam jurnal berikutnya yang berjudul “*Going Forward with #MeToo Movement: Towards a Safer Work Environment*” (Gupta, Gupta, & Nehra, 2019) menjelaskan gerakan #MeToo sebagai gerakan yang meng-global dan hampir seluruh dunia mengetahui gerakan tersebut, termasuk Jepang. Meskipun gerakan ini sudah banyak dikenal, gerakan ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat baik. Misalnya saja, gerakan ini berfokus pada penggunaan media sosial sebagai bentuk kampanye, secara tidak langsung gerakan ini menjadikan media sosial sebagai “pengadilan” bagi pelaku pelecehan seksual. Hal ini tentunya bukan hal yang baik, karena secara tidak langsung telah mempermalukan orang lain dihadapan dunia. Namun dampak baiknya, gerakan ini dapat digunakan bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk menyampaikan masalah, rasa takut, dan dendam mereka. Karena sebagian korban masih sulit untuk membuat laporan pengaduan atas tindakan pelecehan seksual yang mereka alami. Jurnal ini merupakan jurnal yang bagus, karena meskipun mengangkat tema mengenai gerakan #MeToo, jurnal ini tidak hanya berfokus pada kelebihan gerakan #MeToo namun juga memberi pandangan lain mengenai gerakan ini, yaitu kekurangannya. Selain itu gerakan ini juga memberikan saran seperti apa saja yang diperlukan akan lingkungan kerja aman dari kekerasan seksual. Namun yang perlu ditambahkan dalam jurnal ini yaitu bagaimana pemerintah ikut ambil bagian dalam

melancarkan gerakan ini dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan. Sehingga dalam penelitian ini akan mencari tahu apakah ada upaya yang dilakukan Pemerintah Jepang untuk mendukung serta melancarkan gerakan *#MeToo* di Jepang.

Dalam sebuah artikel berjudul “Shiori Ito, *Symbol of Japan’s #MeToo Movement, Wins Rape Lawsuit Damages*” (McCurry, 2019) menuliskan, masuknya gerakan *#MeToo* ini memberikan dampak bagi Jepang, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Meskipun sebenarnya gerakan *#MeToo* belum terlalu populer di Jepang, gerakan ini telah membawa beberapa dampak baik. Misalnya dengan kasus pelecehan yang dialami oleh Shiori Ito. Shiori Ito seorang jurnalis yang mendapatkan pelecehan seksual oleh mantan reporter di salah satu lembaga penyiaran di Tokyo, Jepang. Meskipun mendapatkan banyak cemoohan, bahkan pelecehan secara online, Ito berhasil memenangkan kasusnya dan kini menjadi wajah gerakan *#MeToo* di Jepang. Langkah Ito ini memberikan keberanian terhadap perempuan Jepang lain untuk menyuarakan kasusnya, meskipun belum banyak setidaknya gerakan ini membawa perubahan baik. Artikel ini berisi berita yang menarik mengenai bagaimana Shiori Ito dengan berani berbicara mengenai kasus pelecehan seksual yang diterimanya, dan memberi contoh nyata bagaimana gerakan *#MeToo* berhasil menang melawan pelecehan seksual. Namun artikel ini perlu memberikan sudut pandang lain, bukan hanya dari sudut pandang Shiori Ito. Sehingga dalam artikel ini akan memberikan sudut pandang lain mengenai gerakan *#MeToo* yang dapat memberikan argumen tambahan.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, isu mengenai gerakan *#MeToo* dan kekerasan seksual memang sudah banyak dibahas, namun dari semua penelitian yang dilakukan belum pernah membahas mengenai gerakan *#MeToo* yang ada di Jepang. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini akan membahas mengenai gerakan *#MeToo* di Jepang. Tidak hanya membahas mengenai gerakan *#MeToo*, penelitian ini juga akan membahas mengenai kekerasan seksual yang ada di Jepang, serta peran dan kebijakan yang diambil Pemerintah Jepang untuk mengatasi isu kekerasan ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Social Movement* yang dijelaskan oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani dalam buku *Social Movements An Introduction* untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam buku tersebut, Donatello menjelaskan bahwa *social movements* merupakan sebuah oposisi terhadap globalisasi neoliberal yang dapat dilihat sebagai sekumpulan individu yang mengungkapkan pendapat mengenai isu-isu tertentu, mengadvokasi atau menentang perubahan sosial (Diani and Della Porta 2006, 2). Kemudian dengan menggunakan pendekatan *Social Movements* yang ditulis oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh gerakan *#MeToo* dalam mengatasi isu kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Jepang. Gerakan *#MeToo* ini selain memiliki fokus pada kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan kerja, juga memperhatikan mengenai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta dampak yang ditimbulkan dari ketidaksetaraan tersebut.

Selain itu, gerakan ini juga menitik beratkan pada peran gender, seperti tugas wajib perempuan mengurus urusan domestik (urusan rumah tangga) dan tugas laki-laki adalah bekerja dan berperan penting dalam banyak hal. Perempuan yang sudah berumah tangga sebaiknya memfokuskan perhatian mereka pada urusan domestik seperti mengurus rumah dan anak-anak, padahal perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar karir mereka dalam dunia pekerjaan seperti kaum laki-laki. Selain diskriminasi tersebut, perempuan juga sering mengalami diskriminasi dalam dunia kerja, misalnya seperti perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan, kesempatan memiliki posisi penting dalam pekerjaan mereka, belum lagi pelecehan seksual yang sering diterima di tempat kerja (Hannam, 2016).

Budaya patriarki yang masih melekat di kehidupan masyarakat Jepang membuat bentuk hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Tubuh perempuan menjadi objek utama penindasan oleh budaya patriarki ini. Perempuan sangat rawan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di tengah budaya patriarki ini. Dan banyak dari pelaku pelecehan seksual tidak menyadari bahwa perilaku mereka akan berdampak pada tubuh, pikiran, jiwa, dan bahkan menyebabkan trauma pada korbannya (Eriyanti, 2017). Dalam kehidupan patriarki yang ada di Jepang, perempuan yang sudah menikah lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, hal ini karena masyarakat masih beranggapan bahwa tugas wajib perempuan adalah mengurus rumah dan anak, selain itu kesempatan bagi perempuan dalam dunia kerja juga cenderung kecil, belum lagi adanya ketidaksetaraan gaji bagi pegawai perempuan, dan kasus pelecehan seksual yang rawan diterima pegawai perempuan. Laki-laki dan perempuan

memang berbeda, tetapi bukan berarti perempuan harus “dibedakan”. Dengan menggunakan pendekatan *Social Movements*, gerakan ini ingin membuktikan bahwa perempuan juga dapat berperan penting dalam banyak hal seperti dalam pekerjaannya hingga ikut dalam perpolitikan, dan urusan domestik bukan hal yang wajib dilakukan perempuan, melainkan kewajiban setiap anggota rumah tersebut.

Dalam penelitian ini, gerakan *#MeToo* akan dijelaskan menggunakan teori *Social Movements*, karena gerakan ini bekerja secara internasional dan membawa isu pelecehan seksual yang terjadi di Jepang. Diani menyatakan bahwa gerakan sosial adalah proses sosial yang berbeda, yang terdiri dari mekanisme dimana aktor terlibat dalam aksi kolektif. Mekanisme tersebut diantaranya: terlibat dalam hubungan konfliktual dengan lawan yang teridentifikasi dengan jelas (aktor gerakan sosial terlibat dalam politik atau konflik budaya yang dimaksudkan untuk mendorong atau menentang perubahan sosial), dihubungkan oleh jaringan informal yang padat (jaringan informal yang padat membedakan proses gerakan sosial dari banyak contoh dimana tindakan kolektif dilakukan tempat dan terkoordinasi sebagian besar dalam batas-batas organisasi tertentu), dan berbagi identitas kolektif yang berbeda (gerakan-gerakan sosial bukan hanya sekedar kumpulan dari peristiwa-peristiwa protes pada isu-isu tertentu, atau bahkan kampanye tertentu) (Diani and Della Porta 2006, 22). Melihat kombinasi yang berbeda dari tiga aksi kolektif tersebut memungkinkan kita untuk dapat membandingkan gerakan sosial dengan proses aksi kolektif lainnya. Namun yang perlu ditekankan adalah tidak ada episode empiris dari aksi kolektif. Dalam setiap tindakan kolektif biasanya dapat terdeteksi lebih dari satu proses.

Dalam skripsi ini akan berusaha meneliti dan menganalisis pengaruh gerakan *#MeToo* terhadap kasus pelecehan seksual di Jepang menggunakan pendekatan *Social Movements* dengan indikator berupa: faktor pendorong gerakan *#MeToo* di seluruh dunia termasuk Jepang, faktor pendorong pelecehan seksual di Jepang, serta pengaruh gerakan *#MeToo* terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang. Berdasarkan mekanisme aksi kolektif yang dijelaskan oleh Diani, penelitian ini akan menganalisis bagaimana gerakan *#MeToo* berperan dalam isu pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Jepang.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini dilakukan agar pembaca mengetahui awal mula gerakan *#MeToo* muncul di Jepang serta bagaimana upaya gerakan *#MeToo* dalam mengubah kebijakan pemerintah Jepang mengenai isu pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang menggunakan pendekatan *Social Movements* oleh Della Porta dan Diani. Dalam hal ini pelecehan dan kekerasan seksual yang dimaksud dapat berupa pelecehan seksual secara verbal maupun *physical*. Penelitian ini dilakukan karena melihat masih banyaknya isu pelecehan seksual yang terjadi di Jepang.

Jepang sendiri sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual dan telah beberapa kali dilakukan amandemen. Namun pada kenyataannya undang-undang yang telah ada tersebut belum cukup untuk melindungi masyarakat Jepang, khususnya perempuan dari pelecehan seksual. Oleh karena itu, gerakan *#MeToo* ingin mencoba mengangkat isu pelecehan seksual yang ada di Jepang agar dapat mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah

Jepang sehingga masyarakat lebih sadar akan isu pelecehan seksual dan pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap korban pelecehan seksual.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini karena Hubungan Internasional merupakan ilmu sosial, sehingga akan lebih mudah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan teori sebagai studi kasus untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data dalam bentuk data deskriptif (kalimat tertulis) (Moleong, 1989).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah gerakan *#MeToo* Jepang, objeknya adalah isu pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh gerakan *#MeToo* terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Jepang.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini akan mencari literatur dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, maupun artikel-artikel dan website-website yang terpercaya. Penelitian ini mungkin akan lebih banyak menggunakan artikel dan website yang kredibel dalam penelitiannya, hal ini karena studi kasus yang diangkat tergolong baru dan masih sedikit yang menulis dan membahasnya dalam literatur buku dan jurnal.

1.8.4 Proses Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian akan mengumpulkan data yang diperoleh dalam bentuk data deskriptif. Data ini kemudian akan dibagi dalam beberapa sub topik agar lebih memudahkan dalam menganalisis masalah yang ada dalam studi kasus yang diangkat. Kemudian dalam sub topik ini, data yang didapat sebelumnya akan dikembangkan lagi menjadi kalimat yang lebih deskriptif sehingga menghasilkan jawaban bagi studi kasus yang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilakukan dengan sistematika berikut:

- **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian,

landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

- **BAB II: PEMBAHASAN GERAKAN #METOO DAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG**

Bab ini berisi penjelasan mengenai apa itu gerakan #MeToo, bagaimana gerakan #MeToo masuk hingga menyebar di Jepang, bagaimana respon masyarakat Jepang atas adanya gerakan #MeToo ini, apakah gerakan ini sudah memberikan dampak nyata bagi kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Jepang. Selain itu dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai kasus kekerasan seksual yang ada di Jepang, dan faktor apa yang menyebabkan kekerasan seksual ini.

- **BAB III: PENGARUH GERAKAN #METOO DALAM MENGATASI ISU PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG**

Bab ini akan menjelaskan langkah apa yang dilakukan gerakan #MeToo untuk mengatasi tingginya angka kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Jepang.

- **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini akan berisi kesimpulan dari kasus yang diangkat dan bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan atas kasus yang telah diangkat.

BAB 2

GERAKAN #METOO DAN AWAL MASUKNYA DI JEPANG

2.1 The Origin of #MeToo Movement

2.1.1 Global Movement

#MeToo movement atau gerakan *#MeToo* merupakan sebuah gerakan yang berbentuk kampanye melalui media sosial, yang bertujuan untuk memberantas pelecehan seksual, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Gerakan ini kemudian membangun komunitas yang bertekad untuk memberantas pelecehan seksual dimanapun kekerasan itu terjadi (*#MeToo Movement*, n.d.). Gerakan ini mulai banyak dibicarakan sejak tahun 2017, melalui tagar *#MeToo* yang viral di media sosial karena digunakan oleh seorang aktris *Hollywood* bernama Alyssa Milano. Saat itu Milano berusaha menyuarakan mengenai pelecehan seksual yang dialaminya melalui *Twitter*. Milano menyebutkan bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang produser *Hollywood*, Harvey Weinstein. Dalam *tweet*-nya, Milano juga menuliskan “*If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.*”. Tidak perlu menunggu waktu lama, *tweet* tersebut pun ramai dengan berbagai cerita mengenai pengalaman pelecehan seksual. Sejak saat itu *#MeToo* menjadi solusi bagi para korban pelecehan seksual untuk bersuara sekaligus gerakan solidaritas bagi korban dan penyintas pelecehan seksual lainnya (Ali, 2021).

Banyak orang mengira Alyssa Milano sebagai pencetus gerakan *#MeToo*, namun ternyata salah. Gerakan *#MeToo* ini mulai didirikan pada tahun 2006 oleh Tarana

Burke yang juga penyintas pelecehan seksual. Sebelumnya, Tarana Burke bekerja dalam bidang sosial yang sebagian kegiatannya terlibat langsung dengan anak-anak berkulit hitam untuk selama kurang lebih 30 tahun. Selama bekerja dalam bidang tersebut, Burke telah banyak menyaksikan dan mendengarkan cerita mengenai berbagai kisah menyedihkan, mulai dari kehancuran sebuah keluarga, hingga kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hingga akhirnya, pada tahun 1997 Burke bertemu seorang anak bernama Heaven.

Heaven merupakan seorang gadis berusia 13 tahun yang berada di kamp pemuda yang diurus oleh Tarana Burke. Heaven merupakan seorang gadis manis yang cukup dekat dengan Burke, namun perilakunya yang terbilang hiperaktif dan sering dilingkupi emosi. Hingga suatu hari Heaven memohon kepada Burke untuk mendengarkan ceritanya. Dengan sorot matanya yang memancarkan kesedihan yang begitu mendalam, Heaven bercerita mengenai ayah tirinya (kekasih ibunya) yang melakukan berbagai perilaku mengerikan terhadap dirinya. Di tengah-tengah cerita, Burke terpaksa harus menyela. Burke merasa tidak sanggup untuk terus mendengarkan cerita tersebut. Akhirnya Burke menyerahkan Heaven kepada seorang konselor wanita profesional agar Heaven mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Burke tidak akan pernah melupakan ekspresi Heaven saat itu. Dalam hati dan pikirannya kalimat yang sama terus berulang, “saya juga” (*me too*). Di dalam dirinya, Burke merasa terhubung, Burke mengerti, dan dapat merasakan rasa sakit yang sama seperti yang Heaven rasakan. Karena Burke memiliki luka yang sama seperti Heaven, namun dia belum memiliki cukup keberanian untuk membantu.

Kisah Heaven terus menghantui Burke. Burke merasa bersalah karena tidak dapat membantu gadis kecil itu. Hingga akhirnya pada tahun 2006 Tarana Burke mendirikan sebuah organisasi *Just Be Inc.* Organisasi ini ditujukan untuk membantu korban pelecehan seksual tanpa memandang ras, strata sosial, maupun warna kulit. Organisasi ini kemudian diberi nama *Me Too*. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang berarti besar bagi Tarana Burke. Bukan sekedar aksi viral, gerakan *#MeToo* merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan keadilan yang diharapkan dapat mengubah sudut pandang dan pola pikir dunia mengenai kejahatan pelecehan seksual yang dapat dialami siapapun, dimanapun, dan kapanpun (Ali, 2021).

2.1.2 Masuknya Gerakan *#MeToo* di Jepang

Sukses dengan kampanye di Amerika Serikat, gerakan *#MeToo* mulai merambah berbagai negara lainnya, termasuk negara-negara di Asia, misalnya Jepang. Gerakan *#MeToo* sendiri diyakini mulai masuk Jepang pada tahun 2018, namun sebelum tahun tersebut sudah terdapat kasus yang mengangkat gerakan *#MeToo* di Jepang. Misalnya saja dalam kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang jurnalis wanita bernama Shiori Ito yang dilecehkan oleh Noriyuki Yamaguchi, Kepala Biro Sistem Penyiaran Tokyo di Washington (Zhang et al., 2021, 1). Kasus ini sebenarnya telah terjadi sejak April 2015, namun kasus sempat ditutup dan diduga atas perintah kepala Biro Investigasi Polisi Metropolitan Tokyo (O'dwyer, 2020). Yamaguchi sendiri diyakini sebagai teman Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Oleh karena itu banyak asumsi yang berpendapat bahwa Yamaguchi dapat selamat dari tuduhan kasusnya atas bantuan

dari relasi politiknya. Namun pada tahun 2016 Shiori Ito mengajukan permohonan agar kasusnya dibuka kembali. Dengan menggunakan skenario gerakan *#MeToo*, kasus ini akhirnya mendapatkan sorotan media dan ramai diperbincangkan, bahkan berhasil mendapat perhatian dari berbagai organisasi solidaritas, politisi, hingga selebriti (O'dwyer, 2020). Pada bulan Mei 2017, dengan menggunakan tagar *#FightTogetherWithShiori* masyarakat Jepang mulai meramaikan laman *twitter* untuk memberikan dukungannya kepada Shiori Ito. Dengan dukungan dari berbagai *influencer* yang ada di Jepang, *#MeToo* mulai banyak digunakan dan korban pelecehan seksual di Jepang semakin berani untuk menyuarkan kasus yang mereka alami (Katsumi, 2018). Shiori Ito pun menjadi salah satu nama yang tidak asing di Jepang, bahkan Ito telah dijuluki sebagai “*The Face of Japan’s #MeToo Movement*” (Schiavenza, 2021).

Meskipun telah dikenal sebagai “*The Face of Japan’s #MeToo Movement*”, kasus Shiori Ito diyakini bukan merupakan momentum masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang. Para ahli berpendapat bahwa momentum masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang adalah sejak kasus Junichi Fukuda. Hampir mirip dengan kasus Shiori Ito, Junichi Fukuda yang merupakan seorang pejabat di Kementerian Keuangan Jepang, mendapatkan tuduhan melakukan pelecehan seksual kepada sejumlah jurnalis wanita pada tahun 2018 (Oka, 2018). Tuduhan pertama dilayangkan oleh sebuah majalah yang juga memiliki rekaman audio yang diyakini percakapan antara Fukuda dan jurnalis wanita tersebut. Tidak hanya satu orang, namun ada sejumlah wanita lain yang mengaku sebagai korban Fukuda dan ikut melaporkannya. Selain itu dalam rekaman audio yang dirilis oleh majalah *Shukan Shincho* yang berisi percakapan antara Fukuda

dan seorang jurnalis wanita tersebut terdapat percakapan seperti “Bolehkah saya ikat tangan Anda?” dan “Boleh saya sentuh payudara Anda?”. bahkan dalam rekaman tersebut, Fukuda juga melontarkan ide perselingkuhan saat anggaran telah ditetapkan (Rich, 2018). Rekaman tersebut diambil saat Fukuda pergi minum dengan jurnalis wanita tersebut di sebuah bar dekat rumahnya. Jurnalis tersebut setuju untuk menemui Fukuda karena saat itu Fukuda menjadi narasumber penting beritanya saat itu (The Straits Times, 2018).

Meskipun sudah terdapat bukti rekaman audio, Fukuda tetap menyangkal bahwa dirinya tidak pernah berkata seperti itu kepada seorang jurnalis wanita. Fukuda juga tidak mengingat bahwa dia pernah melontarkan kata-kata yang akan membuat orang salah paham dengan dirinya dan membuat tersinggung. Tidak selaras dengan ucapannya yang menyangkal tuduhan tersebut, Fukuda justru memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia merasa bahwa skandal ini membuat ia tidak dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik (BBC News, 2018). Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso menyatakan telah menegur Fukuda atas skandal yang melibatkan dirinya karena kondisi kementerian yang juga sedang tidak baik saat itu.

Kasus ini menjadi pertanda pertama kali masuknya gerakan *#MeToo* di Jepang. Skandal ini begitu cepat menyebar ke seluruh Jepang dan memenuhi berbagai platform berita. Sumire Hamada, perwakilan dari Pusat Sumber Daya Wanita Jepang-Asia menyatakan bahwa gerakan *#MeToo* dapat mendorong wanita korban pelecehan seksual untuk lebih berani berbicara mengenai kasus yang mereka alami serta memberikan keyakinan kepada para korban bahwa pelecehan seksual merupakan

kejahatan yang tidak dapat ditolerir (CGTN, 2018). Sebelumnya hanya ada sedikit korban pelecehan seksual yang melaporkan kasusnya, terutama yang melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini karena korban cenderung takut disalahkan ketika berbicara mengenai kejadian yang mereka alami (The Straits Times, 2018). Padahal di Jepang sendiri terdapat program yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong angka kesetaraan gender di Jepang terutama dalam dunia kerja. Program ini bernama “*Womenomics*” yang diciptakan oleh Shinzo Abe. Namun sepertinya hal ini masih tidak cukup untuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual di tempat kerja.

Dengan adanya kasus Fukuda ini, diharapkan para korban pelecehan seksual mendapatkan keberanian untuk membuka suara mengenai kasus serupa yang mereka alami. Selain itu, dengan adanya kasus ini puluhan ribu (25 ribu) orang telah menandatangani petisi meminta pemerintah untuk melindungi wanita korban pelecehan seksual.

2.2 Faktor-Faktor yang Mendukung Pelecehan Seksual Di Jepang

Pelecehan seksual sejatinya dapat menyerang siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Dalam mengatasi pelecehan seksual yang ada di sebuah negara, tidak cukup hanya mengatasi inti dari masalah tersebut. Agar masalah tersebut tidak kembali timbul di kemudian hari, harus dilakukan pembenahan hingga ke akar masalah. Pelecehan seksual dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya faktor sosial, politik-ekonomi, hingga lingkungan.

2.2.1 Faktor Budaya

Pandangan masyarakat mengenai gender di suatu tempat atau negara selalu berbeda tergantung bagaimana nilai gender ditanamkan di tempat atau negara tersebut. Nilai gender yang ditanamkan sejak dini akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat kedepannya. Di Jepang sendiri, nilai gender berubah seiring berjalannya waktu. Pada akhir abad ke-19, wanita diharapkan untuk selalu tinggal di dalam rumah, dan pria keluar untuk mencari pekerjaan. Hal ini tentunya memberikan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, dimana ruang gerak perempuan sangat dibatasi dibanding dengan laki-laki (Belarmino & Roberts, 2019, 273). Kemudian pada abad ke-20, peran gender mulai berubah. Dimana perempuan memiliki peran baru sebagai “istri yang baik dan ibu yang bijaksana” atau dikenal dengan istilah *ryousai kenbo*. Peran perempuan ini digambarkan sebagai wanita modern yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anaknya serta merawat mertua. Namun disisi lain, memiliki pilihan untuk bekerja di luar rumah dan berkontribusi dalam perekonomian negara (Koyama, 2012).

Terlepas dari seluruh perubahan nilai yang telah terjadi, posisi perempuan di Jepang dapat dikatakan masih belum cukup seimbang dengan pria. Kini perempuan Jepang memang banyak yang mengejar karirnya, mereka bekerja di luar rumah seperti kebanyakan pria, namun hal ini tidak lama. Kebanyakan perempuan Jepang akan berhenti bekerja saat memasuki dunia pernikahan. Mereka akan lebih memilih untuk fokus terhadap keluarga mereka. Karena masyarakat Jepang masih meyakini bahwa generasi yang baik lahir dari didikan seorang ibu, sehingga perempuan yang sudah menikah lebih baik fokus di rumah dan mengasuh anak. Hal ini bukan merupakan hal

buruk yang perlu dicegah, namun karena pola pikir seperti ini membuat perempuan Jepang enggan mengejar karirnya dan pria Jepang akan cenderung tidak ikut andil dalam kegiatan rumah tangga mereka (mengurus rumah dan anak). Selain itu dunia kerja di Jepang belum cukup ramah dan seimbang terhadap perempuan. Misalnya dalam pemberian gaji, perempuan akan mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada laki-laki, padahal jabatan dan bidang yang mereka kerjakan sama. Dalam dunia kerja di Jepang, perempuan juga tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencapai posisi yang penting (Sari, 2020, 360). Belum lagi mengenai pelecehan seksual di lingkungan kerja. Lingkungan kerja di Jepang belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Masih begitu banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang masih sangat kurang, membuat banyak kasus pelecehan seksual di tempat kerja terabaikan. Bahkan mereka yang telah melaporkan kasusnya hanya diminta untuk tetap bekerja dan mengabaikan kejadian yang mereka alami. Sebaliknya, pelaku pelecehan seksual terlapor masih dapat bekerja asalkan memiliki etos kerja yang tinggi (Zhang et al., 2021, 3).

Tidak hanya pelecehan seksual di tempat kerja, bahkan sejak pandemi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2020 dan aktivitas masyarakat harus dibatasi, kasus kekerasan seksual di Jepang meningkat. Hal ini karena pembatasan aktivitas membuat korban dan pelaku kekerasan seksual semakin sering bersama, sehingga kemungkinan kekerasan seksual terjadi semakin tinggi (Sapto, 2020). Di Jepang, industri hiburan dewasa menjadi hal yang lumrah dan digemari. Oleh karena hal ini, masyarakat Jepang menganggap bahwa pelecehan seksual bukan menjadi masalah penting yang ada di Jepang. Pandangan mereka terhadap perempuan sebagai objek seksual membuat

mereka lebih tidak toleran dan meremehkan kasus pelecehan seksual (Zhang et al., 2021, 3). Hal ini yang perlu diperhatikan kembali oleh masyarakat Jepang kedepannya. Pandangan mereka terhadap perempuan sebagai objek perlu dihilangkan sehingga mereka dapat lebih menghargai perempuan. Selain itu pemerintah Jepang juga harus membuat aturan atau Undang-Undang yang dengan tegas mengatur mengenai pelecehan seksual sehingga korban mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

2.2.2 Faktor Politik-Ekonomi

Sebagai negara maju, tingkat kesetaraan gender di Jepang dapat dikatakan sangat rendah. Menurut “*Gender Gap Index*”, Jepang menempati peringkat 121 dari 153 negara yang mengikuti evaluasi dalam mengukur tingkat kesetaraan gender yang ada di sebuah negara (Zhang et al., 2021, 2). Sebagai negara maju dalam bidang pendidikan dan teknologi, peran perempuan dalam kemajuan negara ini masih sangat kecil. Hal ini karena ketidaksetaraan gender yang ada di Jepang membuat laki-laki lebih memiliki “*gender power*” yang mengakibatkan laki-laki lebih mudah diterima dalam berbagai kegiatan maupun pekerjaan yang ada. Ketidaksetaraan gender di Jepang menjadi masalah serius karena selain membuat perempuan sulit untuk mendapatkan peran dalam pekerjaan dan masyarakat, ketidaksetaraan gender di Jepang membuat perempuan sulit mendapatkan hak untuk berbicara dan mendapat perlakuan adil (Zhang et al., 2021, 3).

Bahkan dalam kasus pelecehan seksual masyarakat Jepang masih sangat sedikit yang memberikan perhatian penuh terhadap kasus yang ada. Bahkan pada salah satu

kasus pelecehan seksual yang mendapatkan banyak sorotan, korban (Shiori Ito) sempat dihalangi oleh polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, pelaku pelecehan seksual yang akan dilaporkan merupakan sosok yang memiliki jabatan dan reputasi, sehingga dikhawatirkan Ito tidak akan mendapatkan sorotan dari media dan justru akan kehilangan semua kerja kerasnya selama ini (Zhang et al., 2021, 3). Dari alasan tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perlindungan bagi korban pelecehan seksual di Jepang masih sangat rendah. Terutama jika pelecehan seksual tersebut melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan dan reputasi, dapat dipastikan korban yang hanya masyarakat biasa tidak akan mendapatkan keadilan yang mereka inginkan.

Ketika pelaku pelecehan seksual merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan maupun seseorang yang memiliki peran dalam dunia politik, pelaku tersebut memiliki *power* lebih untuk menutupi kasus yang melibatkan mereka. Terlebih bagi seorang yang terlibat dalam dunia politik, *image* yang mereka bangun sangatlah penting. Ketika mereka sudah mendapatkan *image* yang tidak baik di masyarakat, maka dapat dipastikan karir politik mereka akan hancur. Peran perempuan dalam dunia politik juga masih sangat rendah. Meskipun pemerintah sudah membuat program baru untuk perempuan agar dapat lebih berperan aktif dalam politik pemerintahan, namun kenyataannya hal ini belum memberikan dampak signifikan terhadap nilai perempuan dalam tatanan sosial di Jepang.

Selain itu faktor ekonomi yang dimiliki pelaku dan korban juga bisa berpengaruh dalam kelangsungan sebuah kasus. Korban yang biasanya memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah dari pelaku akan cenderung mendapat ketidakadilan

dari pelaku yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi. Pelaku dapat dengan mudah menutupi segalanya dengan kekuasaan yang mereka miliki agar kasus mereka tidak muncul ke permukaan. Dan korban yang kebanyakan tidak memiliki kekuasaan hanya bisa melihat kasus mereka berlalu begitu saja. Meski begitu bukan berarti semua kasus pelecehan seksual tidak terselesaikan dan lewat begitu saja. Beberapa kasus pelecehan seksual yang melibatkan pejabat negara dapat muncul ke permukaan hingga mendapat banyak perhatian dari masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat seharusnya dapat lebih peduli dengan kasus pelecehan seksual yang ada di sekitar mereka. Karena terkadang sedikit perhatian masyarakat dapat membuat perbedaan yang jelas terhadap keberlangsungan sebuah kasus. Namun hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah dan petinggi perusahaan lainnya. Pemerintah dan petinggi perusahaan seharusnya dapat memberi kesempatan yang sama besarnya bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja maupun politik.

2.2.3 Faktor Lingkungan-Sosial

Selain kedua faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi ketimpangan gender di Jepang. Perempuan di Jepang masih sering dianggap sebagai objek seksual, sehingga setiap kegiatan yang mereka lakukan masih rawan mendapatkan pelecehan seksual. Saat mereka pergi bekerja, berjalan saat malam hari, bahkan saat berada di lingkungan kantor atau sekolah, perempuan masih bisa mendapatkan pelecehan seksual. Tentu saja pelecehan seksual tidak hanya didapatkan perempuan, namun pelecehan terhadap laki-laki

cenderung tidak sebanyak yang dialami perempuan. Seorang profesor di Universitas Tokyo, Chizuko Ueno berpendapat bahwa kasus pelecehan seksual dan tuntutan hukum mengenai pelecehan seksual di Jepang mulai meningkat semenjak masyarakat semakin sadar mengenai pelecehan seksual dalam beberapa tahun terakhir yang diakibatkan oleh gerakan *#MeToo* (Saunders, 2021). Berdasarkan catatan dari Kementerian Kehakiman Jepang, pada tahun 2018 terdapat 410 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan, dan meningkat menjadi 445 kasus pada tahun 2019 (Saunders, 2021). Sedangkan berdasarkan laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan terdapat 7.323 konsultasi mengenai pelecehan seksual di tahun 2019 (Saunders, 2021). Seorang mantan anggota kelompok aktivis mahasiswa SEALD, Wakako Fukuda menyatakan meskipun telah memiliki Undang-Undang untuk mencegah pelecehan seksual, hal ini tidak berarti Undang-Undang tersebut cukup membantu. Terlebih isu pelecehan seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu sedangkan masyarakat Jepang masih sangat patriarki. Di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang terdidik dan awam dengan isu pelecehan seksual sehingga tidak dapat membedakan mana bentuk pelecehan seksual dan bukan. Dan saat seseorang sadar mendapatkan pelecehan seksual, mereka cenderung tidak berani bersuara, karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang seharusnya ditutupi, terlebih jika korban bekerja, hal ini akan mempengaruhi karir dan instansi tempat mereka bekerja (Saunders, 2021).

Selain itu, industri hiburan dewasa yang lumrah dan digemari masyarakat Jepang menjadi faktor pendukung meningkatnya kekerasan seksual di Jepang. Oleh karena hal ini, masyarakat Jepang menganggap bahwa pelecehan seksual bukan menjadi masalah penting yang ada di Jepang. Pandangan mereka terhadap perempuan

sebagai objek seksual membuat mereka lebih tidak toleran dan meremehkan kasus pelecehan seksual (Zhang et al., 2021, 3). Hal ini yang perlu diperhatikan kembali oleh masyarakat Jepang kedepannya. Pandangan mereka terhadap perempuan sebagai objek perlu dihilangkan sehingga mereka dapat lebih menghargai perempuan. Selain itu pemerintah Jepang juga harus membuat aturan atau Undang-Undang yang dengan tegas mengatur mengenai pelecehan seksual sehingga korban mendapatkan perlindungan yang lebih baik.



BAB 3

UPAYA GERAKAN #METOO JEPANG DALAM MENGATASI ISU PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG

3.1 #MeToo dalam Memengaruhi Isu Pelecehan Seksual di Jepang

#MeToo merupakan sebuah gerakan yang berfokus pada isu pelecehan seksual sebagai tujuan utamanya. Gerakan ini mulai menunjukkan eksistensinya setelah pada tahun 2017, Alyssa Milano menyuarakan kasus pelecehan seksual yang dialaminya oleh seorang produser Hollywood terkenal, Harvey Weinstein. Dengan menggunakan *#MeToo*, Milano menceritakan kasus yang dialaminya melalui laman *Twitter* hingga akhirnya cuitannya ramai dan mulai diikuti oleh orang-orang di berbagai belahan dunia untuk berbagi kisah mereka dengan menggunakan gerakan *#MeToo* tersebut. Gerakan ini menjadi alat bagi penyintas kekerasan seksual untuk menyuarakan keluhan dan berbagi cerita mereka. Gerakan *#MeToo* mulanya adalah sebuah gerakan untuk berbagi informasi, hingga akhirnya menjadi aktor internasional yang bergerak di seluruh dunia dan telah menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengaruhnya dalam politik internasional serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat global mengenai isu kekerasan seksual. Dan Jepang merupakan salah satu negara yang juga merasakan dampak dari penyebaran gerakan *#MeToo* di negaranya.

Bermula dari seorang wanita bernama Shiori Ito yang memanfaatkan gerakan *#MeToo* untuk mengangkat kisahnya dalam melawan kasus pelecehan seksual yang dialaminya, gerakan *#MeToo* mulai masuk ke Jepang. Masyarakat Jepang khususnya perempuan, cenderung tidak banyak bersuara, mereka lebih memilih diam daripada harus menceritakan pelecehan seksual yang mereka alami karena merasa hal tersebut

adalah aib yang harus ditutupi. Namun, dengan adanya gerakan *#MeToo* dan Shiori Ito yang dengan berani menceritakan kisahnya, kini perempuan Jepang tidak lagi takut untuk bersuara. Meskipun belum semua orang berani menyuarkan kasus mereka hingga ke ranah lebih lanjut (pengadilan), namun setidaknya mereka tidak akan merasa sendiri karena banyak orang diluar sana berbagi kisah yang sama dengan mereka. Selain mendapat perhatian dari masyarakat Jepang, kasus Shiori Ito juga mendapatkan perhatian dari berbagai negara di luar Jepang. Namanya kini telah dikenal oleh dunia sebagai *“The Face of Japan’s #MeToo Movement”*.

Dalam perjalanannya untuk menyebarkan kesadaran masyarakat Jepang terkait isu pelecehan dan kekerasan seksual, gerakan *#MeToo* di Jepang menggunakan pendapat dan keprihatinan individu yang berubah menjadi bentuk partisipasi sosial. Cara pandang sebuah gerakan sosial berfokus pada individu yang secara aktif mengekspresikan penentangan mereka terhadap suatu isu, dalam penelitian ini isu pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang. Bentuk keprihatinan ini kemudian menjadi upaya untuk menghentikan maupun memperbaiki ketidakadilan yang ada dalam kehidupan (Diani and Della Porta 2006, 3). Jepang dikenal sebagai negara yang memegang teguh tradisi dan patriarki merupakan salah satu dari berbagai tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Jepang. Nilai-nilai patriarki yang ada di Jepang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Jepang, misalnya saja dalam sistem pembagian kerja. Di Jepang, sistem pembagian kerja masih menggunakan sistem gender, hal ini karena mereka percaya bahwa sistem ini yang menjadi faktor kunci keberhasilan negara. Dimana perempuan akan menjadi ibu rumah tangga, dan laki-laki bekerja sebagai pencari nafkah (Villa, 2019, 61).

Oleh karena itu, untuk menjelaskan konsep gerakan *#MeToo* di Jepang sebagai gerakan sosial, akan digunakan pendekatan *Social Movement* oleh Della Porta dan Diani. Konsep gerakan sosial adalah proses sosial yang berbeda, dan terdiri dari mekanisme dimana aktor terlibat dalam aksi kolektif. Disini Diani menjelaskan beberapa mekanisme yaitu: Pertama, terlibat dalam hubungan konfliktual dengan lawan yang teridentifikasi dengan jelas. Aktor gerakan sosial terlibat dalam politik atau konflik budaya yang dimaksudkan untuk mendorong atau menentang perubahan sosial. Konflik yang dimaksud adalah hubungan oposisi antara aktor yang mencari kendali atas isu yang sama dan dalam klaimnya membuat klaim negatif satu sama lain (Diani and Della Porta 2006, 21). Kedua, dihubungkan oleh jaringan informal yang padat. Jaringan informal yang padat membedakan proses gerakan sosial dari banyak contoh dimana tindakan kolektif dilakukan tempat dan terkoordinasi sebagian besar dalam batas-batas organisasi tertentu (Diani and Della Porta 2006, 21). Ketiga berbagi identitas kolektif yang berbeda. Gerakan-gerakan sosial bukan hanya sekedar kumpulan dari peristiwa-peristiwa protes pada isu-isu tertentu, atau bahkan kampanye tertentu. Sebaliknya, proses gerakan sosial terjadi hanya ketika identitas kolektif berkembang melampaui peristiwa dan inisiatif tertentu (Diani and Della Porta 2006, 21). Tiga mekanisme tersebut yang nantinya akan menjelaskan aktivisme sebuah gerakan dalam mencapai tujuan mereka.

Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi terhadap aktivisme gerakan *#MeToo* di Jepang dengan menggunakan pendekatan *social movement* untuk melihat bagaimana gerakan *#MeToo* memengaruhi perilaku negara dan masyarakat Jepang dalam menanggapi serta mengatasi isu pelecehan seksual yang ada di Jepang. Dan

berikut merupakan analisis gerakan *#MeToo* di Jepang dengan menggunakan mekanisme dimana aktor terlibat dalam aksi kolektif.

3.1.1 Aksi Kolektif Konfliktual

Aksi kolektif konfliktual yang dimaksud dalam mekanisme ini adalah ketika aktor gerakan sosial terlibat dalam politik atau konflik budaya yang bertujuan untuk mendorong atau menentang perubahan sosial (Diani and Della Porta 2006, 21). Konflik yang dimaksud adalah hubungan oposisi antara aktor gerakan sosial yang mencoba menyatakan ketidaksetujuan akan suatu nilai atau prinsip moral yang tidak sesuai dengan aksi gerakan sosial dengan cara membuat klaim negatif satu sama lain dan jika salah satu klaim tersebut direalisasikan akan merusak kepentingan aktor lain (Diani and Della Porta 2006, 21). Dalam hal ini gerakan *#MeToo* memiliki konflik dengan negara dan masyarakat Jepang yang masih memegang prinsip patriarki serta melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Tradisi Jepang yang masih kental akan budaya patriarki membuat laki-laki merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan sehingga masih banyak perempuan yang dipandang sebagai objek. Selain itu, isu pelecehan seksual masih menjadi hal yang tabu di Jepang. Masyarakat yang awam akan pelecehan seksual terkadang tidak dapat membedakan mana bentuk pelecehan seksual. Dan ketika menyadarinya, korban cenderung akan menutupi kejadian yang menimpa mereka tersebut karena menganggap hal itu aib yang harus ditutupi.

Jepang sendiri sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual, namun pada realitanya undang-undang ini belum dapat menekan angka pelecehan seksual di Jepang. Bahkan terkadang korban dicegah untuk melaporkan kasusnya karena merasa tindakan yang mereka lakukan akan sia-sia. Apalagi jika kasus tersebut melibatkan seseorang yang memiliki *power*. Dengan menggunakan gerakan *#MeToo* diharapkan masyarakat Jepang lebih sadar mengenai isu pelecehan seksual dan berani menyuarkan apa yang mereka rasakan sehingga isu pelecehan seksual mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah Jepang.

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang terkenal di Jepang adalah kasus seorang jurnalis bernama Shiori Ito. Dengan menggunakan tagar *#MeToo*, Ito mulai membagikan kisah pelecehan seksual yang dialaminya. Bermula dari situ, masyarakat Jepang yang mulanya tidak berani bersuara mulai membagikan kisah mereka di lama *Twitter* menggunakan *#MeToo*. Meskipun tidak semua orang bereaksi baik terhadap apa yang dilakukannya, Shiori Ito tidak pernah menyesali keputusannya untuk bersuara. Dengan langkah beraninya tersebut, Shiori Ito juga memberikan keberanian terhadap perempuan Jepang lain agar tidak takut dan malu terhadap apa yang mereka alami karena pada dasarnya hal tersebut bukanlah kesalahan mereka. Ito akhirnya menjadi wajah gerakan *#MeToo* di Jepang dan membuat gerakan *#MeToo* semakin banyak dikenal masyarakat Jepang. Bahkan kisah Ito tidak hanya menarik perhatian masyarakat Jepang, tetapi juga menarik perhatian dunia.

Pembangunan identitas kolektif juga memerlukan aktor yang membangun koneksi antara kejadian yang berbeda, pribadi dan publik, terletak di titik yang berbeda di waktu

dan ruang, yang relevan dengan pengalaman mereka, dan menenunnya menjadi lebih luas meliputi narasi (Melucci 1996). Advokasi yang dilakukan oleh gerakan *#MeToo* ini berawal dari sebuah cerita yang dibagikan oleh korban pelecehan seksual dan mengajak orang lain yang mengalami kejadian serupa untuk berani bersuara serta mengungkapkan kejadian yang mereka alami. Dengan membingkai sebuah isu yang berisi fakta dan kesaksian, jaringan dapat menarik perhatian masyarakat untuk bertindak dan memberikan dukungan atas isu yang sedang di advokasikan. Karena tanpa adanya kasus-kasus individual yang terjadi, masyarakat akan sulit memberikan perhatiannya kepada sebuah isu yang beredar apalagi sampai menuntut perubahan kebijakan kepada pemerintah suatu negara. Dikarenakan untuk mencapai sebuah informasi teknis diperlukan adanya “testimoni” atau pengakuan dari orang lain mengenai sesuatu hal agar masyarakat dapat tertarik atau percaya dengan hal tersebut.

3.1.2 Jaringan Informal yang Padat

Jaringan informal yang padat membedakan proses gerakan sosial dari banyak contoh dimana tindakan kolektif dilakukan tempat dan koordinasi, sebagian besar dalam batas-batas organisasi tertentu (Diani and Della Porta 2006, 21). Sebuah proses gerakan sosial ada sejauh individu dan aktor terorganisir, sambil menjaga otonomi dan independensi mereka, terlibat dalam pertukaran sumber daya yang berkelanjutan dalam mengejar tujuan bersama (Diani and Della Porta 2006, 21).

Dalam hal ini, aktivis gerakan *#MeToo* menggunakan sebuah tagar ‘*#MeToo*’ untuk melakukan kampanye mengenai isu yang di advokasikan. Di Jepang, gerakan

#MeToo telah berevolusi menjadi *#WeToo Japan*. Gerakan ini memiliki tujuan yang sama dengan gerakan *#MeToo* di seluruh dunia yaitu untuk menyoroti kasus pelecehan seksual, namun selain itu gerakan ini juga akan memberikan dukungan terhadap korban pelecehan seksual serta mendorong pihak ketiga agar ikut terlibat dalam mengambil tindakan melawan pelecehan seksual (The Mainichi, 2018). Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pihak ketiga adalah pemerintah Jepang. Gerakan ini resmi dibentuk dan dideklarasikan pada 3 Maret 2018 pada pertemuan yang dihadiri oleh beberapa anggota yang membentuk gerakan *#WeToo Japan*, salah satunya adalah seorang jurnalis yang dikenal sebagai 'The Face of Japan's #MeToo Movement' Shiori Ito, serta beberapa anggota lain yang terdiri dari Direktur Regional UN Women Asia dan Pasifik, seorang aktivis dan penulis, serta pemilik usaha bidang bisnis dan akademik (The Mainichi, 2018). Dalam pertemuan tersebut, dilakukan diskusi yang membahas mengenai apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung orang-orang yang berani menyerukan suara mereka.

Selain menggunakan *#MeToo* atau *#WeToo*, penyebaran gerakan *#MeToo* di Jepang juga dipengaruhi oleh seorang perempuan luar biasa yang berani menyuarakan pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya sendiri. Shiori Ito, merupakan seorang jurnalis perempuan Jepang yang dengan berani menyuarakan kasus pelecehan seksual yang dialaminya, dimana kebanyakan perempuan Jepang cenderung memilih bungkam. Kasus Shiori Ito bermula pada tahun 2015 dimana Ito menuduh seorang jurnalis bernama Noriyuki Yamaguchi telah memperkosa dirinya di sebuah kamar hotel (Hernon, 2018). Namun kasus tersebut ditutup oleh kepala divisi investigasi di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, Itaru Nakamura. Penutupan kasus ini

diyakini karena Nakamura merupakan mantan sekretaris menteri kabinet Yoshihide Suga yang merupakan orang kepercayaan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Selain itu, Yamaguchi juga dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Shinzo Abe (Hernon, 2018). Yamaguchi juga membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan menuduh Ito terlalu banyak minum sehingga mabuk. Namun kasus tersebut tidak berhenti disitu saja, Shiori Ito menolak untuk pergi meninggalkan insiden yang dialaminya begitu saja. Pada tahun bulan Mei 2017, tagar *#FightTogetherWithShiori* ramai digunakan untuk memberikan dukungan kepada Shiori Ito (Katsumi, 2018). Berkat dukungan yang diberikan kepadanya, Ito akhirnya menulis sebuah buku yang berjudul *'Black Box'* yang menceritakan dengan jelas mengenai insiden yang dialaminya, dan kembali mengajukan tuntutan kepada Yamaguchi pada akhir tahun 2017 (Katsumi, 2018). Kasus Shiori Ito ini mendapatkan perhatian seluruh dunia, dan berkat keberaniannya Ito dinobatkan sebagai *'Person of The Year'* oleh majalah *Time* (Hernon, 2018) dan dikenal sebagai *'The Face of Japan's #MeToo Movement'*. Berkat dukungan yang diberikan kepada Shiori Ito, masyarakat Jepang mulai sadar akan isu pelecehan seksual dan ikut menyerukan pengalaman pelecehan seksual yang mereka alami.

Dengan mengangkat isu mengenai pelecehan dan kekerasan seksual, *#MeToo* telah berhasil membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Orang-orang mulai bersuara, menyerukan perlawanan terhadap kekerasan dan pelecehan dan kekerasan seksual di negara mereka masing-masing. Karena menjadi sebuah gerakan yang menyebar melalui media sosial, informasi yang dibagikan dan

tersedia di media sosial merupakan hal yang sangat penting untuk menghubungkan gerakan *#MeToo* di seluruh dunia.

Dengan menggunakan platform *Twitter*, para penyintas pelecehan seksual mulai memberanikan diri untuk membagikan kisah mereka (Lakritz, 2018). Dari situ cuitan-cuitan tersebut, publik mulai memberikan perhatiannya dan media berbondong-bondong menyoroti isu tersebut. Selain menggunakan media sebagai alat untuk menyebarkan *#MeToo*, jaringan ini juga memiliki website resmi dengan nama '*MeToo Movement*', website tersebut digunakan sebagai media untuk melaksanakan kampanye *#MeToo* serta memberikan informasi seputar gerakan yang berupa diskusi dan pertemuan mengenai gerakan *#MeToo*. Untuk mendapatkan informasi mengenai *#MeToo* di seluruh dunia, tersedia juga website bernama '*MeToo Rising*'. Dalam website tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait gerakan *#MeToo* di 300 kota di seluruh dunia (MeToo Rising, n.d.). Dengan menggunakan media dan website tersebut akan mempermudah individu dan organisasi dalam memperoleh informasi mengenai gerakan *#MeToo*.

Berkat dukungan dari masyarakat di media sosial serta audiensi yang dilakukan para aktivis, gerakan *#MeToo* mulai mendapatkan sorotan dan mulai menunjukkan dampaknya di tiap-tiap negara. *#MeToo* telah berhasil memberikan dorongan keberanian kepada korban pelecehan di luar sana agar berani menyuarakan kisah mereka serta memberikan kesadaran dan perhatian terhadap isu pelecehan seksual kepada masyarakat global.

3.1.3 Identitas Kolektif

Identitas kolektif, ketika gerakan-gerakan sosial bukan hanya sekedar kumpulan peristiwa-peristiwa protes terhadap isu-isu tertentu atau bahkan kampanye tertentu (Diani and Della Porta 2006, 21). Sebaliknya, proses gerakan sosial terjadi hanya ketika identitas kolektif berkembang, yang melampaui peristiwa dan inisiatif tertentu (Diani and Della Porta 2006, 21). Gerakan sosial harus membawa komitmen tiap anggota untuk mencapai suatu tujuan bersama yang memungkinkan aktivis atau organisasi untuk menganggap diri mereka terkait erat (Diani and Della Porta 2006, 21). Hal ini karena dalam gerakan sosial kriteria keanggotaan adalah hal yang tidak stabil dan semuanya tergantung padang pengakuan antara aktor (Melucci 1996, bab 3). Dalam melakukan sebuah kampanye untuk mengadvokasi sebuah isu, aktivis dalam jaringan harus mampu mengidentifikasi peluang politik dengan membujuk maupun menekan aktor-aktor yang memiliki kekuatan lebih besar. Dalam melakukan kampanye di Jepang, gerakan *#MeToo* menggunakan negara sebagai perhatian internasional ketika menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi di negaranya terutama setelah kemunculan Shiori Ito dengan *#MeToo*.

Disini gerakan *#MeToo* yang telah meningkatkan kesadaran masyarakat Jepang berhasil membuat isu pelecehan seksual yang ada di Jepang mendapatkan perhatian internasional dengan diangkatnya isu pelecehan seksual di Jepang sebagai salah satu yang dibahas dalam agenda UPR oleh PBB melalui UNHRC. Dalam laporan hasil akhir *Universal Periodic Review* (UPR) Jepang yang ditinjau oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 13 April 2018, Jepang mendapatkan 125 rekomendasi dari 106 negara yang mendorong Jepang untuk menerapkan berbagai kebijakan baru untuk

melindungi masyarakatnya dari pelecehan seksual, diskriminasi terhadap perempuan, perlindungan hak “perempuan penghibur di Jepang”, dan berbagai kebijakan lainnya (United Nations Human Rights, 2018). Isi dari laporan hasil akhir dari *Universal Periodic Review* (UPR) tersebut yang membahas mengenai perempuan adalah sebagai berikut (United Nations Human Rights, 2018):

a. *Cross-cutting Issues*

Kesetaraan dan nondiskriminasi.

1. Meningkatkan implementasi Undang-Undang anti diskriminasi dan mengadopsi Undang-Undang anti-diskriminasi sesuai dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial berdasarkan pasal 14 ayat 1 Konstitusi Jepang, dengan maksud untuk memastikan larangan segala bentuk diskriminasi langsung dan tidak langsung, termasuk atas dasar usia, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, etnis atau kebangsaan, yang juga secara efektif mengriminalisasi ujaran kebencian.
2. Melarang dan menindas segala bentuk diskriminasi terhadap non-warga negara, dan undang-undang yang menghapus stereotip yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan.
3. Menghilangkan ketentuan legislatif yang diskriminatif terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender yang substantif, sesuai dengan Konvensi CEDAW.

b. *Civil and Political Rights*

Hak untuk hidup, bebas, dan aman milik seseorang.

Melakukan tindakan nyata untuk menuntut pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya secara *ex officio* (melalui lembaga yang berwenang).

Administrasi keadilan, termasuk impunitas, dan supremasi hukum.

Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk secara efektif menangani kekerasan terhadap perempuan asing, minoritas, dan penduduk asli dengan menuntut dan memberikan sanksi atas segala bentuk kekerasan, dan memastikan bahwa korban memiliki akses ke sarana pemulihan dan perlindungan.

Larangan segala bentuk perbudakan.

Negara bertanggung jawab secara hukum terhadap isu “perempuan penghibur”, dan bertanggung jawab atas memastikan hak publik termasuk mengakui tanggung jawab hukum, menuntut pelaku dan menghukum pelaku, serta memberikan ganti rugi kepada korban.

c. *Economic, Social, and Cultural Rights*

Hak atas pendidikan.

Meningkatkan akses bagi perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan yang berkualitas.

d. *Rights of Specific Person or Groups*

Perempuan.

1. Mengadopsi definisi diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. Memperkuat promosi kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dengan mengambil langkah-langkah untuk memerangi semua diskriminasi dan stereotip terhadap perempuan dalam hukum dan dalam praktik.
3. Memperkuat kerangka legislatif untuk mempromosikan kesetaraan gender, khususnya di bidang ketenagakerjaan dengan menerapkan Undang-Undang tentang Promosi Partisipasi dan Kemajuan Perempuan di Tempat Kerja, serta melanjutkan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender sepenuhnya, terutama di pasar tenaga kerja dan gaji.
4. Memerangi kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi seksual, dan secara efektif melindungi hak-hak perempuan dan anak.
5. Memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan menyelidiki semua laporan kekerasan dalam rumah tangga.

6. Melindungi perempuan dari kekerasan seksual dengan memperluas cakupan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke situasi lain selain pasangan hidup bersama dan dengan eksplisit mengkritisi pemerkosaan dalam perkawinan anak.

Dilihat pada tahun 2019, pemerintah Jepang telah merevisi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (*The Law to Prevent Harassment in the Workplace*) dan akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2020 (Pitchford, 2020). Namun sayangnya dalam gerakan *#MeToo* di Jepang belum bisa memastikan apakah perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang mengenai pelecehan seksual sudah diterapkan secara maksimal. Karena dapat dilihat dari Undang-Undang sebelumnya pemerintah Jepang belum bisa memaksimalkannya dan belum memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku pelecehan seksual. Bagi pelaku pelecehan seksual di Jepang, mereka hanya akan dituntut untuk membayarkan ganti rugi terhadap korban, hal ini karena pemerintah Jepang enggan menjatuhkan sanksi berat (Matsui, 2019). Dan sejauh ini sanksi yang didapatkan sebuah perusahaan yang tidak menerapkan sistem pencegahan pelecehan seksual hanya sebatas pada pengumuman nama perusahaan yang tidak mematuhi anjuran pemerintah, meskipun hal ini dianggap sebagai hal yang besar bagi masyarakat Jepang, nyatanya sanksi ini belum cukup meyakinkan publik (Matsui, 2019). Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut akan terus diawasi untuk melihat keefektifannya, dan apabila Undang-Undang

tersebut terbukti tidak efektif dalam mengatasi pelecehan seksual, maka Jepang harus meninjau kembali kebijakan tersebut (Pitchford, 2020).

Hal ini bertujuan agar negara tetap mempertahankan implementasi kebijakan yang telah diubah agar tetap berjalan sesuai komitmen yang telah dibuat, dan tidak hanya menjadi pengalih perhatian publik terhadap suatu isu semata. Gerakan *#MeToo* juga akan berperan sebagai pengawas aktor target agar tetap menjalankan kebijakan sesuai dengan komitmen dan mencegah terjadinya penyimpangan.

3.2 Hasil Dari Masuknya Gerakan *#MeToo* Terhadap Isu Pelecehan Seksual di Jepang

Setelah menerapkan mekanisme aksi kolektif yang dijelaskan oleh Diani, gerakan *#MeToo* Jepang telah berhasil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah Jepang mengenai isu pelecehan seksual yang ada.

Pertama, gerakan *#MeToo* Jepang telah berhasil mendapatkan perhatian masyarakat dan media Jepang melalui isu di advokasikan. Dengan mengangkat isu pelecehan seksual yang masih dianggap tabu, *#MeToo* berhasil mendapatkan perhatian masyarakat Jepang terutama perempuan korban pelecehan seksual. Menggunakan tagar *#MeToo*, perempuan korban pelecehan seksual menjadi berani bersuara, mereka angkat bicara mengenai kasus yang mereka alami. Setelah mendapatkan perhatian dari publik, isu ini pun akhirnya ramai dibicarakan, menimbulkan debat, hingga pertemuan untuk membahas isu yang sebelumnya sangat dihindari. Disinilah peran pertama jaringan berlangsung. Gerakan *#MeToo* Jepang dapat dikatakan berhasil dalam tahap pertama ini.

Kedua, gerakan *#MeToo* berhasil mengangkat isu pelecehan seksual di Jepang sebagai salah satu isu yang dibahas dalam agenda UPR UNHRC.

Ketiga, gerakan *#MeToo* telah mencapai tahap ketiga ini dan berhasil memengaruhi produser kelembagaan melalui *international governmental UNHRC*, namun prosedur kelembagaan ini masih berbentuk komitmen yang akan di pegang Jepang untuk membenahi negaranya sesuai dengan poin-poin yang disampaikan dalam laporan hasil akhir UPR.

Untuk tahap keempat, gerakan *#MeToo* Jepang telah berhasil, karena negara telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Dan untuk tahap kelima, masih harus melihat lagi bagaimana Jepang mengatasi isu pelecehan seksual di negaranya setelah Revisi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja ditetapkan. Apakah pemerintah akan konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkannya, atau peraturan baru yang ditetapkan hanya menjadi penenang bagi masyarakat yang menuntut keadilan? Oleh karena itu, pada tahap kelima ini belum dapat ditentukan apakah tercapai atau tidak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini mencoba menganalisa pencapaian gerakan *#MeToo* di Jepang dalam memengaruhi kebijakan pemerintah Jepang terhadap isu pelecehan seksual di Jepang pada tahun 2017-2019. Untuk menganalisa gerakan *#MeToo* dalam memengaruhi kebijakan pemerintah Jepang, digunakan pendekatan *Social Movement* oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani dalam penelitiannya. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini membahas mengenai faktor kemunculan gerakan *#MeToo* di Jepang, serta hasil yang dicapai oleh gerakan *#MeToo* di Jepang dalam mengatasi isu pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Jepang selama 2017-2019.

Dalam menganalisis upaya Gerakan *#MeToo* di Jepang dalam memengaruhi isu pelecehan seksual yang ada di Jepang, digunakan mekanisme aksi kolektif yang dijelaskan oleh Diani. Tiga mekanisme tersebut adalah terlibat dalam hubungan konfliktual dengan lawan yang teridentifikasi dengan jelas, dihubungkan oleh jaringan informal yang padat, dan berbagi identitas kolektif yang berbeda. Gerakan *#MeToo* Jepang berhasil mendapatkan perhatian publik melalui peran media, baik itu media nasional Jepang maupun media internasional yang ikut menyoroti isu yang diangkat oleh aktivis ke ranah yang lebih luas. Ditandai dengan kasus Shiori Ito yang menyuarkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya dengan menggunakan tagar “*#MeToo*” di *Twitter*. Tagar tersebut kemudian menjadi media bagi masyarakat Jepang

untuk ikut menyuarakan kasus pelecehan seksual yang mereka alami. Gerakan *#MeToo* membuktikan aktivisme gerakannya dengan cara menyadarkan kesadaran masyarakat dan organisasi dunia dengan diangkatnya isu pelecehan seksual di Jepang diangkat ke ranah internasional dalam agenda UPR melalui *Intergovernmental Organization*, yaitu PBB melalui UNHRC. Dan gerakan *#MeToo* juga menjadi pengawas bagi Jepang agar tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan negaranya yang baru. Dalam hal ini, Jepang masih perlu meninjau ulang apakah kebijakan yang baru telah dilaksanakan secara maksimal atau belum.

Setelah mengidentifikasi mekanisme gerakan *#MeToo* dalam mengatasi isu pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang. Kemudian akan dilihat hasil dari masuknya gerakan *#MeToo* dalam mengatasi isu pelecehan dan kekerasan seksual di Jepang. Gerakan *#MeToo* di Jepang telah berhasil memengaruhi perilaku masyarakat dan pemerintah sebuah negara, dengan ditetapkannya revisi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Kemudian, isu pelecehan seksual yang dialami oleh Shiori Ito melalui gerakan *#MeToo* telah berhasil menjadikan isu pelecehan seksual sebagai isu yang mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Jepang.

Keseluruhan bab dalam skripsi ini telah menganalisis aktivisme gerakan *#MeToo* di Jepang melalui pendekatan *Social Movement*. Gerakan *#MeToo* di Jepang telah berhasil memberikan perubahan terhadap kebijakan pemerintah Jepang mengenai isu pelecehan seksual di negaranya. Namun, meskipun kebijakan pemerintah Jepang mengenai isu pelecehan seksual telah berubah, hal ini perlu diamati lebih lanjut untuk dapat melihat apakah pemerintah Jepang akan konsisten menerapkan kebijakan yang baru dengan maksimal.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini telah menunjukkan pencapaian gerakan *#MeToo* terhadap perubahan kebijakan pemerintah Jepang terhadap isu pelecehan seksual di Jepang. Meskipun begitu, penerapan kebijakan baru berupa Revisi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, bukan berarti gerakan *#MeToo* telah berhasil di Jepang. Hal ini masih memerlukan peninjauan lebih lanjut terhadap pemerintah Jepang dalam menerapkan kebijakan yang baru. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi terkait penelitian ini agar penelitian selanjutnya membahas mengenai efektivitas dari Revisi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang ditetapkan pemerintah Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- #MeToo Movement. n.d. "me too." *me too. Movement*. Accessed February 21, 2022. <https://metoomvmt.org/>.
- Alami, A N. 2010. "Mengapa Gender Menjadi Isu Penting Dalam Hubungan Internasional?" *LIPI: Pusat Penelitian Politik*. Accessed 2020.
- Ali, Fitri Usman. 2021. "#METOO – AWAL MULA." *Asiawomennews.com*. 16 March. Accessed 2022. <https://www.asiawomennews.com/women-opinion/metoo-awal-mula/>.
- BBC News. 2018. "#MeToo hits Japan as Junichi Fukuda quits over harassment claims." *BBC*, 19 April. <https://www.bbc.com/news/world-asia-43819001>.
- Belarmino, Melanie, and Melinda R Roberts. 2019. "Japanese Gender Role Expectations and Attitudes: A Qualitative Analysis of Gender Inequality." *Journal of International Women's Studies* 20 (7): 271-288. Accessed March 5, 2022. <https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2171&context=jiws>.
- CGTN. 2018. "Will #MeToo Movement Hit Japan After Sexual Harassment Row?" *CGTN*. 20 April. Accessed June 24, 2022. https://news.cgtn.com/news/304d444f356b7a6333566d54/share_p.html.
- Diani, Mario, and Donatella Della Porta. 2006. *Social Movements: An Introduction*. N.p.: Wiley.
- Eriyanti, L D. 2017. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 27-37. Accessed 2020.
- Evans, A. 2018. "#MeToo: A Study on Sexual Assault as Reported in The New York Times." *Occam's Razor* 11-17. Accessed 2020.
- Gupta, R, A Gupta, and D Nehra. 2019. "Going Forward with #MeToo Movement: Towards a Safer Work Environment." *Journal of Psychosexual Health* 174-179. Accessed 2020.
- Hannam, J. 2016. "A Cultural History of Women in Modern Age. In L. Connor, Power: Women, Politics, and Power in Europe After 1920." *United Kingdom: Bloomsbury Academic*. Accessed 2020.
- Hernon, Matthew. 2018. "Shiori Ito, the Face of the #MeToo Movement in Japan, Speaks Out | News & Opinion." *Tokyo Weekender*. 2 February. Accessed July 4, 2022.

- <https://www.tokyoweekender.com/2018/02/shiori-ito-face-metoo-movement-japan-speaks/>.
- Katsumi, Takahiro. 2018. "An Introduction to #MeToo in Japan · Global Voices." *Global Voices*. 11 February. Accessed July 4, 2022. <https://globalvoices.org/2018/02/11/an-introduction-to-metoo-in-japan/>.
- Kimura, Kan. 2015. "Discourses About Comfort Women in Japan, South Korea, and International Society." *International Relations and Diplomacy* 3: 809-817. Accessed 2019. <http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90003708.pdf>.
- Koyama, Shizuko. 2012. "Ryosai Kenbo: The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan." *The Intimate and the Public in Asian and Global Perspectives* 1. Accessed Mei 27, 2022.
- Lakritz, Talia. 2018. "Women Share How the #MeToo Movement Changed Their Lives." *Insider*. 1 October. Accessed June 29, 2022. <https://www.insider.com/me-too-hashtag-sexual-harassment-assault-2017-11>.
- Matsui, Shigenori. 2019. "Sexual Harassment in Japan | Centre for Asian Legal Studies." *UBC Blogs*. 5 December. Accessed July 5, 2022. <https://blogs.ubc.ca/cals/sexual-harassment-in-japan/>.
- McCurry, Justin. 2019. "Shiori Ito, symbol of Japan's MeToo movement, wins rape lawsuit damages." *The Guardian*. 18 December. Accessed 2020. <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/18/shiori-ito-symbol-of-japans-metoo-movement-wins-lawsuit-damages>.
- Melucci, Alberto. 1996. *Challenging Codes*. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
- MeToo Rising. n.d. *Me Too Rising*. Accessed July 4, 2022. <https://metoorising.withgoogle.com/>.
- Modrek, Sopideh, and Bozhidar Chakalov. 2019. "The #MeToo Movement in the United States: Text Analysis of Early Twitter Conversations." *Journal of Medical Internet Research* 21. Accessed 2020.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.

- Murphy, Megan. 2019. "Introduction to “#MeToo Movement”." *Journal of Feminist Family Therapy* 31: 63-65. Accessed 2020. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08952833.2019.1637088>.
- O'dwyer, Shaun. 2020. "What lies behind Shiori Ito's lonely #MeToo struggle." *The Japan Times*. 26 January. Accessed April 1, 2022. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/01/26/commentary/japan-commentary/lies-behind-shiori-itos-lonely-metoo-struggle/>.
- Oka, Daisuke. 2018. "Opposition parties want more answers on Fukuda sexual harassment case - The Mainichi." *The Mainichi*. 28 April. Accessed June 24, 2022. <https://mainichi.jp/english/articles/20180428/p2a/00m/0na/023000c>.
- Pitchford, Samuel. 2020. "New Anti-Harassment Law Introduced in Japan — Human Rights Pulse." *Human Rights Pulse*. 2 July. Accessed July 5, 2022. <https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/new-anti-harassment-law-introduced-in-japan>.
- Plate, Andrea. 2019. "JAPAN: RIDING THE RAILS OF SEXUAL HARASSMENT." Asia Media International. <https://asiamedia.lmu.edu/2019/10/15/japan-riding-the-rails-of-sexual-harassment/>.
- Rich, Motoko. 2018. "Top Finance Official in Japan Resigns Over Harassment Accusations (Published 2018)." *The New York Times*. 18 April. Accessed July 4, 2022. <https://www.nytimes.com/2018/04/18/world/asia/japan-sexual-harassment-junichi-fukuda.html>.
- Rusman. 2010. "Jugun Ianfu; Sejarah Kelam Jepang di Indonesia." *The Global Review*. 12 July. Accessed 2020. <https://theglobal-review.com/jugun-ianfu-sejarah-kelam-jepang-di-indonesia/>.
- Salengke, Haufan Hasyim. 2019. "Rekor, 282 Guru di Jepang Dihukum karena Pelecehan Seksual." *Media Indonesia*. 25 December. Accessed 2020. <https://mediaindonesia.com/internasional/279790/rekor-282-guru-di-jepang-dihukum-karena-pelecehan-seksual>.
- Sapto, L W. 2020. "Pandemi, Kekerasan Seksual di Jepang Meningkat." *ValidNews.id*, 7 November.

- Sari, Annisa Yuliana. 2020. "Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang." *Journal of International Relations* 6: 358-367. Accessed 2020. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Saunders, Rebecca. 2021. "The push to find real solutions to sexual harassment is ongoing, even in 'safe' Japan." *The Japan Times*. 29 March. Accessed July 2, 2022. <https://www.japantimes.co.jp/community/2021/03/29/issues/sexual-harassment-safe-japan/>.
- Schiavenza, Matt. 2021. "Asia In-Depth Podcast: The Face of Japan's #MeToo Movement." *Asia Society*. 11 March. Accessed April 1, 2022. <https://asiasociety.org/blog/asia/asia-depth-podcast-face-japans-metoo-movement>.
- Suliyati, Titiek. 2018. "Geisha: Antara Tradisi dan Citra Buruk." *Kiryoku 2*: 90-97. Accessed 2020. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/kiryoku>.
- Sunarni, Nani, and Eka Kurnia Firmansyah. 2020. "CITRA PEREMPUAN DALAM PERIBAHASA JEPANG MENURUT PANDANGAN ISLAM." *Metahumaniora* 10: 64-78. Accessed 2020. <https://jurnal.unpad.ac.id/metahumaniora/article/view/26943>.
- The Mainichi. 2018. "'#MeToo' movement evolving into new campaign '#WeToo' in Japan - The Mainichi." *毎日新聞*. 5 March. Accessed July 4, 2022. <https://mainichi.jp/english/articles/20180305/p2a/00m/0na/002000c>.
- The Straits Times. 2018. "Japanese finance minister admonishes top bureaucrat Junichi Fukuda after harassment report, but no punishment." *The Straits Times*. 12 April. Accessed February 27, 2022. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japanese-finance-minister-admonishes-top-bureaucrat-junichi-fukuda-after-harassment>.
- United Nations Human Rights. 2018. "UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS." *OHCHR*. 13 April. Accessed August 5, 2022. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session28/JP/JapanHCLetter.pdf>.
- Villa, Luisa Fernanda. 2019. "Classic Patriarchal Values and Their Effects on Working Japanese Women." *Revista Mundo Asia Pacifico* 8: 60-75. Accessed June 27, 2022.
- World Economic Forum. 2018. "The Global Gender Gap Report 2018." [weforum.org. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf).

YAMAGUCHI, KAZUO. 2019. "Japan's Gender Gap – IMF Finance & Development Magazine | March 2019." International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/03/gender-equality-in-japan-yamaguchi>.

Zhang, Jiayu, Chengzi Sun A, and Ying Hu. 2021. "Representing Victims and Victimizers: An Analysis of #MeToo Movement Related Reports." *Women's Studies International Forum* 1-7. Accessed March 5, 2022. <https://www.journals.elsevier.com/womens-studies-international-forum>.

